

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto mengemukakan bahwa “pemberdayaan” merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal ini, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu-hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial-budayanya.¹ Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam hidupnya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap sumber-sumber (mencakup fisik, manusia dan intelektual), dan ideologi (meliputi keyakinan, nilai dan pemikiran).² Program peningkatan peranan perempuan perlu menjangkau semua kelompok perempuan, tetapi perhatian utama akan ditujukan kepada perempuan golongan ekonomi lemah di pedesaan, daerah rawan sosial ekonomi di perkotaan serta daerah nelayan, perempuan yang menjadi kepala keluarga serta

¹Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 109

²Zakiyah, “Pemberdayaan Perempuan Oleh Lajnah Wanita Dan Putri Al Irsyad Surabaya”, *Analisa*, 1, (2010)

generasi muda perempuan.³ Terdapat empat indikator pemberdayaan yaitu:

- a. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan
- b. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- c. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
- d. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara.⁴

Menurut Riant Nugroho, untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, yaitu:

- a. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang hendak diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
- b. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
- c. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.⁵

³Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skills Pada Keluarga Nelaya*(Bandung : Penerbit Alfabeta, 2007), 92.

⁴Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),2

2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
- b. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- c. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlihat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.⁶

3. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Dalam pemberdayaan perempuan, terdapat banyak metode dan strategi yang diterapkan. Strategi pengembangan perempuan, meliputi

⁵Ibid., 3.

⁶Ibid., 136-137

perhatian ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan yang tergolong dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, mendorong perempuan yang berpenghasilan rendah untuk mendapat kesempatan lebih besar dalam menuntut pendidikan pasca pendidikan dasar, mendorong makin ikut berperannya perempuan dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi bagi pembangunan.

Langkah-langkah pokok kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui penyusunan rencana dan pelaksanaan program peningkatan kedudukan dan peranan perempuan secara lintas sektoral, menyusun program khusus yang diperuntukkan bagi perempuan, agar dapat mengejar ketertinggalannya dari kaum pria di berbagai bidang, meningkatkan kegiatan pendidikan bagi perempuan baik kegiatan sektoral maupun kegiatan khusus peranan perempuan, dan mengupayakan perluasan kesempatan kerja dan berusaha disektor formal dan informal dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesejahteraan dan produktivitas kerja serta peningkatan perlindungan kerja bagi perempuan.⁷

B. Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)

Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi

⁷Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Perubahan Sosial.*, 95.

sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga.⁸ Peran perempuan sebagai kepala rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarganya. Keluarga adalah kesatuan masyarakat kecil yang merupakan inti dan sendi-sendi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat itu. Apabila keluarga-keluarga sejahtera, maka masyarakat akan sejahtera pula. Perempuan yang berstatus kepala keluarga ia harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya dan harus memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya.⁹

Kedudukan wanita dalam Islam ditempatkan sebagai tempat terhormat. Bahkan wanita di rumah tangganya menjadi pilar utama yang akan menopang keberlangsungan keluarga. Peranan wanita dalam masyarakat tidak terpisahkan dari keluarga. Perubahan sosial dimasyarakat tidak akan berlangsung jika tidak terdapat gerakan dari keluarga.¹⁰ Wanita mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin. Potensi yang dimiliki wanita untuk menopang ekonomi keluarga memang cukup besar. Namundemikian

⁸DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesaProvinsiJawaTimur, “PedomanUmumJalinMatraPenanggulanganFeminisasiKemiskinan” (Surabaya :Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017), 17.

⁹Oktaviana Nidya Putri, “Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga”, *Prosiding KS: Riset dan PKM*, 2 (2013), 282.

¹⁰Nurul Hanani, *Feminisme Gender (Peran Sosial dan Politik Perempuan Arab Masa Nabi Muhammad SAW Hingga Pengaruhnya Terhadap Era Sekarang)* (Kediri: Azhar Risalah, 2013), 117.

wanita tidak menonjolkan diri atau mengklaim bahwa mereka menjadi penyangga utama ekonomi keluarga.¹¹

Hal-hal yang menyebabkan seorang perempuan disebut sebagai KRTP antara lain: telah bercerai, suami meninggal, ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (ditelantarkan), memiliki suami yang difabel/ cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif, KRTP sebatang kara usia produktif dan mampu mengelola usaha.¹²

Menurut Ahmad Munir, status janda bukanlah posisi yang menguntungkan bagi wanita secara biologis, psikologis, maupun sosiologis. Bahkan Al-Qur'an mengategorikan kaum janda sebagai salah satu kelompok kaum lemah (*mustadl'afin*) yang harus diberikan perhatian dan santunan. Kelemahan wanita dalam panggung kehidupan rata-rata dipengaruhi oleh struktur tatanan dan pandangan manusia dalam kehidupan terhadap posisi wanita, baik dari sisi kesempatan struktur fisik maupun dari sisi tatanan yang memosisikan wanita pada kondisi ketergantungan. Sebagai contoh akibat dari tanggungjawab laki-laki (suami) yang utuh terhadap wanita, maka ketika wanita ditinggalkan suami (janda), dalam tatanan tersebut ia sebagai kelompok yang kehilangan

¹¹ Sugeng Haryanto, "Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Puncanganak Kecamatan Tugu Trenggalek", *Ekonomi Pembangunan*, 9 (Desember, 2008), 218

¹² Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, "Pedoman Umum Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan" (Surabaya : Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017), 18.

gantungan yang membutuhkan ganti gantungan untuk menopang hidupnya. Seperti firman Allah SWT.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ¹³

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”. (Q.S al-Baqarah: 241).¹⁴

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa apapun posisi status wanita janda, karena perceraian ataupun karena kematian, mereka berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan hidup (*mata’*) yang dapat menopang kesusahannya ketika mereka kehilangan jaminan kehidupan dari suami yang sebelumnya. Janda adalah bagian dari komunitas wanita yang mempunyai struktur kondisi tertentu, akibat dari perpisahan hubungan suami istri yang membentuk struktur tersendiri dengan berbagai konsekuensi dan eksistensinya.¹⁵

C. Program Jalin Matra

1. Pengertian Program Jalin Matra

Program Jalin Matra merupakan program yang didesain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya (*wong cilik*) berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 Tim Nasional Percepatan

¹³QS. Al Baqarah (2): 241.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah Waqaf Ibtida'* (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018), 39

¹⁵ Ahmad Munir, *KebangkitanKaumJandaAkarTeologis-Spiritual Kaum Papa* (Yogyakarta : PustakaPelajar, Cetakan I, 2009) , 5- 6

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Perlindungan Sosial dengan status 30% kesejahteraan terendah. Program Jalin Matra memiliki 3 (tiga) kegiatan unggulan yang secara spesifik berbeda dari segi sasaran, yaitu Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin dengan status kesejahteraan 1 - 5% terendah (Desil 1), Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan status kesejahteraan 1 - 10% terendah (Desil 1) dan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dengan sasaran Rumah Tangga Rentan Miskin dengan status kesejahteraan 11 – 30% terendah (Desil 2 dan 3).

Permasalahan kemiskinan secara keseluruhan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup dibawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Fenomena yang sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jika jumlah penduduk wanita di Jawa Timur ternyata lebih didominasi oleh perempuan. Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Timur 37,47 juta, terdiri dari 18,5 juta laki-laki (49,37%) dan 18,97 perempuan (50,63%). Hal tersebut diperkuat oleh rilis data Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Juli 2012, menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga perempuan dengan status kesejahteraan 30% terendah di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 2.864.364 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan jumlah KRTP sebanyak 700.160 atau 24,4%.¹⁶

2. Feminisasi Kemiskinan

Feminisasi kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup dibawah garis kemiskinan secara bersama. Feminisasi kemiskinan juga mengandung arti suatu perubahan tingkat kemiskinan yang menyerang perempuan atau kepala rumah tangga perempuan. Feminisasi kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kurangnya pendapatan, tetapi juga hasil dari perampasan kemampuan dan bias gender yang hadir dalam masyarakat dan pemerintah, serta juga akibat meningkatnya insiden “ibu” sebagai kepala rumah tangga tunggal. Prioritas terhadap kepala rumah tangga perempuan karena meskipun seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin, kemiskinan itu disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda serta kemampuan yang berbeda pula dalam menghadapinya.¹⁷ Menurut Soeharto, ciri-ciri kemiskinan yaitu;

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar

¹⁶DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesaProvinsiJawaTimur, “*Pedoman Umum Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan*” (Surabaya :Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017), 5-6

¹⁷Ibid., 8.

- b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental
- c. Tidak mampu berfungsi sosial
- d. Rendahnya sumber daya manusia
- e. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
- g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain)
- h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.¹⁸

Menurut Bagong Suyanto, akar penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu : *Kemiskinan alamiah*, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieleminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan *patronclien*, jiwa gotong-royong, dan sejenisnya yang

¹⁸Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial. *Kemiskinan buatan*, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan perempuan selain berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan politik juga berkaitan dengan karakteristik tertentu. Kemiskinan biasanya terkonstruksi pada kategori populasi tertentu, seperti orangtua tunggal, perempuan, anak-anak, kelompok etnis tertentu, tunawisma, lanjut usia, kelompok difabel.¹⁹ kemiskinan perempuan selain berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan politik juga berkaitan dengan karakteristik tertentu. Kemiskinan biasanya terkonstruksi pada kategori populasi tertentu, seperti orangtua tunggal, perempuan, anak-anak, kelompok etnis tertentu, tunawisma, lanjut usia, kelompok difabel.²⁰

3. Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan merupakan program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagi rumah

¹⁹Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya* (Malang: In-Trans Publishing, 2013), 8-9.

²⁰Rustanto, *Menangani Kemiskinan.*, 102

tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).²¹ Ruang lingkup program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan sebagai berikut:

a. Verifikasi data KRTP

Verifikasi data kesesuaian kondisi riil KRTP di Desa sasaran yang dilakukan dengan metode rembug warga.

b. Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP

Klarifikasi adalah pengecekan kondisi riil KRTP hasil verifikasi menggunakan metode observasi langsung. Identifikasi usulan kebutuhan KRTP adalah kegiatan untuk berdialog dan menjangkau aspirasi potensi dan sumber daya yang dimiliki.

c. Fasilitas Bantuan KRTP

Bantuan KRTP berupa modal investasi atau modal kerja, bantuan usaha pendukung untuk mengurangi pengeluaran/belanja keluarga, serta kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup.

d. Peningkatan Kapasitas KRTP

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan KRTP dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterima sehingga bisa berkelanjutan.

²¹Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, “*Pedoman Umum Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan*” (Surabaya :Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017), 10

e. Pemberdayaan Mothercare

Pemberdayaan Mother care dilakukan dengan cara memanfaatkan kader PKK Desa sebagai pendamping desa kegiatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.

f. Pendampingan Program

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program, pembinaan realisasi usaha, dan pengelolaan bantuan kepada KRTP sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem serta prosedur yang ditentukan.²²

Tujuan program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan antara lain :

- a. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai *mother care* bagi KRTP;
- b. Memperluas akses rumah tangga sasaran dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha/ pendapatan keluarga;
- c. Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar;

²²Ibid., 14-16

- d. Mendorong motivasi berusaha (*need for achivement*) dan kemampuan (*life skill*) KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.²³

Terdapat beberapa prinsip dasar dari program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, yaitu :

- a. Membantu dengan hati

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin khususnya agar masuk kriteria Kepala Rumah Tangga Perempuan agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu, program dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial, dan *social compassion*.

- b. Parsipatoris Deliberatif

Pengambilan keputusan di tingkat *stakeholder* dilakukan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalan masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga (*parsipatoris deliberatif*). “Rembug Warga” menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang

²³Ibid., 10-11

kelayakan dan pemetaan awal kondisi KRTP sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual.

c. Perspektif Gender

Program ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan kesadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai pusat perhatian diposisikan sebagai pelaku (subjek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan, dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

d. Transparan dan Akuntabel

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi.

e. Keterpaduan

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi Pendamping, tenaga pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

f. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan pada dasarnya merupakan “stimulus” ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh KRTP.²⁴

Tahapan program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sosialisasi, kegiatan penyebarluasan informasi pelaksanaan PFK untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat, dan mendapatkan dukungan dalam proses pelaksanaannya.
- b. Pra Rembug Warga, adalah pertemuan khusus yang diadakan sebelum Rembug Warga, bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan rembug warga, dengan agenda pembentukan dan penetapan Sekretariat Desa dan Pendamping Desa.
- c. Rembug Warga, dilakukan sebagai upaya sosialisasi Jalin Matra PFK di tingkat Desa yang bertujuan untuk menjelaskan

²⁴Ibid., 12-13

Jalin Matra PFK kepada stakeholder dan masyarakat desa, menyampaikan bahwa bantuan keuangan khusus jalin matra PFK telah dianggarkan dalam APBDDes, Mensosialisasikan Sekretariat Desa dan Pendamping Desa, Verifikasi calon penerima bantuan jalin matra PFK.

- d. Klarifikasi Dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP, dilakukan dengan berdialog dan berinteraksi langsung dengan KRTP sasaran untuk mengecek kondisi riil/ faktual KRTP serta mendalami jenis kebutuhan KRTP yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran.
- e. Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus, dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Sekretariat Desa yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur.
- f. Rembug Kelompok Masyarakat (Pokmas) KRTP, merupakan forum pertemuan masing-masing pokmas calon Rumah Tangga Sasaran Jalin Matra PFK.
- g. Pengadaan Barang, pengadaan barang untuk kebutuhan RTSM harus sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan RTSM,
- h. Penyerahan Barang Bantuan, sekretariat desa bersama pendamping desa melakukan penyerahan bantuan barang kepada KRTP.

- i. Bimbingan Teknis, dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis kepada KRTP agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberikan, sehingga memberikan manfaat optimal secara ekonomi. Bimbingan teknis bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses pemasaran maupun informasi-informasi lain sesuai kebutuhan.
- j. Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban ini terdiri dari pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban publik.
- k. Pengelolaan Dan Pelestarian Program, usaha produktif dikelola secara mandiri oleh rumah tangga sasaran dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.²⁵

D. Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ekonomi Keluarga

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni "*oikos*" yang berarti keluarga atau rumah tangga dan "*nomos*" peraturan atau hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai peraturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.²⁶ Keluarga merupakan lembaga ekonomi selain organisasi formal seperti perusahaan, lembaga pemerintah, bank, serikat pekerja, dan koperasi. Kajian ekonomi

²⁵Ibid., 9-11

²⁶Gloria E. Wenas dan Henry Opod, "Hubungan Kesejahteraan dan Status Sosial Ekonomi Keluarga di Kelurahan Artemba II Kota Blitung", *Jurnal e-Biomedik*, 1 (2015), 533

keluarga merupakan kajian ekonomi yang dikhususkan pada keluarga, bukan pada lembaga ekonomi lain seperti perusahaan, pemerintah, dan sebagainya. Serta dengan kajian ekonomi, rumah tangga merasa terbantu dalam cara mengambil keputusan yang lebih baik, juga membantu menentukan pilihan yang terbaik bagi rumah tangga.²⁷

Ekonomi sebagai disiplin ilmiah (ilmu) termasuk ke dalam ilmu sosial yang mengkaji masalah utama, yakni kelangkaan, suatu kondisi yang disebabkan oleh kombinasi yang tidak seimbang antara keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas.²⁸

Ekonomi keluarga mengkaji tentang bagaimana keluarga mengambil keputusan dan menentukan berbagai pilihan dalam menghadapi kelangkaan sumber daya, yang dihadapkan dengan desakan pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh keluarga.²⁹

Soerjono Soekanto mengutip keterangan Aristoteles bahwa di dalam negara terdapat tiga unsur lapisan masyarakat, yaitu mereka kaya sekali, melarat dan berada ditengah-tengahnya.³⁰ Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Secara teoritis semua manusia dianggap sama derajatnya, akan tetapi sesuai dengan keadaan hidup kelompok-kelompok sosial tidak demikian, perbedaan atas lapisan merupakan

²⁷Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 6-7

²⁸Ibid., 3

²⁹Lena Farida, “Kontribusi Pendapatan Perempuan Bekerja Sektor Informal Pada Ekonomi Keluarga”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 2 (2011), 107

³⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2012), 197

gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Pada umumnya terdapat tiga lapisan masyarakat yaitu lapisan atas (*upper class*) tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah (*middle class*) dan lapisan bawah (*lower class*).³¹

Di dalam masyarakat terdapat tiga lapisan ekonomi yang berbeda yaitu ekonomi keluarga mampu, ekonomi keluarga sedang dan ekonomi keluarga tidak mampu.

a. Ekonomi keluarga mampu

Ekonomi keluarga mampu ini termasuk lapisan atas atau dalam istilah sehari-hari juga dinamakan “elite”. Mereka yang berada pada lapisan ini umumnya tingkat pendapatannya tinggi, mereka juga memiliki benda-benda berharga seperti uang, tanah luas, mobil dan sebagainya. Pekerjaan mereka berupa wiraswasta, manager, bankir, dan sebagainya.

b. Ekonomi keluarga sedang

Keluarga pada lapisan ini tingkat pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi pemilikan barang-barang berharga terbatas sebagai tabungan. Pekerjaan berupa pedagang, pegawai negeri, dan sebagainya.³² Pada dasarnya status keluarga ini dapat memenuhi kebutuhannya seperti kebanyakan keluarga lainnya, hanya saja yang membedakan adalah

³¹Ibid., 226

³²Komariyah dan Deni Muhammad, “Kontribusi Wanita Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Pekerja UKM Kota Sukabumi”, *Jurnal Ummi*, (2016), 93

tingkat fasilitas yang digunakan berbeda dengan fasilitas ekonomi yang di atasnya.³³

c. Ekonomi keluarga tidak mampu

Lapisan ekonomi yang ketiga adalah ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin),³⁴ Mereka yang hanya sedikit sekali atau tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah.³⁵ golongan ini memiliki angka penghasilan dibawah rata-rata. Mulai dari program pendidikan, kesehatan, dana kesejahteraan masyarakat kelas bawah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan jumlahnya mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Pekerjaan mereka tidak tetap, biasanya menjadi buruh, pedagang kecil dan sebagainya.

Ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut:

a. Ukuran kekayaan

Barangsiapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut, misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya

³³Zulfa Ulin Nuha, "Pemberdayaan Ekonomi keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Terhadap Ekonomi Keluarga Muslim Di Kabupaten Blitar" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 47

³⁴Ibid., 48

³⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar.*,197

mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya.

b. Ukuran kekuasaan

Barangsiapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atasan.

c. Ukuran kehormatan

Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan/atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa.

d. Ukuran ilmu pengetahuan

Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif karena ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hal yang demikian memacu segala macam usaha untuk mendapat gelar, walau tidak halal.³⁶

³⁶Ibid., 208

2. Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga

Upaya peningkatan ekonomi keluarga yaitu salah satunya dengan adanya pemberdayaan, pemberdayaan merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang ada, sumber utama pendapatan atau perekonomian bagi pekerja wanita adalah upah dan tunjangan-tunjangan. Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor yang ada pada keluarga, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi, dan menghargai potensi yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin dicapai.³⁷

Upaya peningkatan ekonomi keluarga dapat melalui cara yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pelatihan bagi para ibu rumah tangga dalam rangka meningkatkan keterampilan kerja para wanita miskin.
- b. Adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam bentuk pemberian bantuan permodalan, agar dapat berwirausaha diluar sektor pertanian.

³⁷Sri Rahayuningsih, “Upaya Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Pengrajin Batik”, *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers*, (2015), 4-6

c. Menggalakkan sektor-sektor produktif serta membantu didalam pemasaran produk.³⁸

3. Indikator Peningkatan Ekonomi Keluarga secara umum

Indikator adalah sesuatu yang bisa membantu seseorang untuk memahami posisi dan kedudukan saat ini, arah yang akan dituju dan berapa jauh dapat melakukan perbaikan, serta berapa lama untuk mencapai arah yang akan dituju.³⁹ Peningkatan secara umum merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, kualitas, maupun kuantitas. Sedangkan peningkatan secara epistimologi adalah menaikkan derajat taraf, mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya. Peningkatan ekonomi keluarga adalah perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi keseharian dalam keluarga. Hubungan keluarga dari aspek ekonomi merupakan masalah yang paling pokok dalam rumah tangga, karena dalam keluarga yang mendorong sejahteranya keluarga adalah dari bidang ekonomi. Fungsi ekonomi memegang peranan penting dalam sebuah keluarga karena merupakan faktor mendasar untuk menunjang kebutuhan fisik keluarga.⁴⁰ Peningkatan pendapatan rumah tangga menyebabkan batas anggaran rumah tangga berubah. Peningkatan pendapatan juga

³⁸Ibid., 8

³⁹Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera, Sejarah Pengembangan Evaluasi Dan Keberlanjutannya* (Bogor: t.p., 2006), 42

⁴⁰Nita Aprilia Siswoyo, "Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Aktivitas Komunitas Sulam Pita di Kampung 1001 Malam", *e- Jurnal*, 1 (2016), 20

menyebabkan rumah tangga menanggapi melalui pemilihan penambahan barang dan jasa yang akan dibeli dan dikonsumsi.⁴¹

Indikator peningkatan ekonomi keluarga dapat diukur melalui beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

a. Jumlah pendapatan

Seluruh penghasilan atau penerimaan berupa uang atau barang dari semua anggota rumah tangga yang diperoleh baik berupa upah atau gaji, pendapatan dari usaha maupun penerimaan transfer (bantuan).

b. Pendidikan

Berkaitan dengan angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan ketersediaanya sarana pendidikan.

c. Kesehatan

Kondisi kesehatan anggota rumah tangga dilihat dari segi seringnya mengalami gangguan kesehatan, baik gangguan penyakit menahun ataupun gangguan lainnya yang dapat mengganggu aktivitasnya.⁴²

4. Pengeluaran rumah tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan nilai belanja yang dilakukan untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam tempo waktu tertentu (bulan). Pengeluaran rumah tangga untuk pangan adalah susunan dan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata yang umum dikonsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pola pengeluaran atau konsumsi pangan sangat

⁴¹Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*.,122

⁴²Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera*.,42-45

dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi rumah tangga seperti tingkat pendapatan, harga bahan pangan, dan karakteristik rumah tangga yaitu jumlah anggota keluarga, umur, jenis pekerjaan, dan pendidikan.

Sedangkan pengeluaran untuk non pangan adalah pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga diluar pangan. Pengeluaran non pangan seperti perumahan, listrik, bahan bakar, jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian dan lain sebagainya.⁴³

5. Indikator Perekonomian Keluarga Muslim

Sedangkan menurut syariat Islam, Husein Syahatah mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator perekonomian rumah tangga muslim, yaitu sebagai berikut:

- a. Perekonomian rumah tangga muslim dianggap suatu kumpulan norma syara' yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijtihad para ulama.
- b. Sistem perekonomian Islam bagi rumah tangga muslim merupakan bagian dari system perekonomian Islam bagi negara, dengan pertimbangan bahwa system perekonomian rumah tangga itu bekerja di bawah sistem Islami dan norma-norma syariat Islam.
- c. Sistem perekonomian rumah tangga muslim di dalam transaksi-transaksi, seperti berinfak, menyimpan, menabung, kepemilikan, pemberian zakat, dan lain-lain, dapat mewujudkan tujuan syara' bagi para anggotanya.

⁴³Muhammad Syaifulloh, Eliza dan Suardi Tarumun, "Analisis pendapatan dan pengeluaran Rumah Tangga Pada Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kota Pekanbaru", JOM FapertaUR, 01 (Februari 2017), 6-7

d. Pemenuhan kebutuhan materi membantu perwujudan terpenuhinya kebutuhan spiritual yang seimbang.

Indikator perekonomian muslim diatas merupakan acuan untuk kesejahteraan ekonomi keluarga muslim, yaitu pada prinsipnya mengedepankan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan material sehingga dapat terwujudnya kebutuhan spritual yang seimbang sesuai dengan norma-norma syariat Islam.⁴⁴

⁴⁴Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 48-49